

Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan

Ferdinal Asmin

Institut Pertanian Bogor

Jl. Raya Dramaga Bogor- Indonesia

E-mail: ferdinalasmin76@yahoo.com, Phone +62 251 8622642

How to Cite This Article: Asmin, F. (2018). Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan kawan-kawan. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(2). doi: 10.25139/jsk.v2i2.516

Received: 17-12-2017,
Revision: 08-02-2018,
Acceptance: 21-04-2018,
Published online: 16-07-2018

English Title: *Culture and Economic Development: A Review of Chavoshbashi et al. Article*

Abstract *The research of the cultural effect on economic development is always interesting for many researchers. An article of Chavoshbashi et al. has provided an understanding to study the cultural effect by using a dynamics system approach. This paper reviewed the article by focusing on their system thinking. This review strengthened an argument that it is important to consider the cultural values in the economic development.*

Keywords: *cultural values, economic development, dynamics system approach*

Abstrak Penelitian pengaruh budaya terhadap pembangunan ekonomi selalu menarik bagi banyak peneliti. Artikel Chavoshbashi dan kawan-kawan telah memberikan sebuah pemahaman untuk mempelajari pengaruh budaya tersebut dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Tulisan ini mengkaji ulang artikel tersebut dengan memberikan perhatian pada sistem berpikir yang dikembangkan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan. Kajian ini memperkuat argumen tentang pentingnya pertimbangan nilai-nilai budaya dalam pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: nilai-nilai budaya, pembangunan ekonomi, pendekatan sistem dinamik

PENGANTAR

Kemajuan ekonomi menjadi salah satu tujuan pembangunan yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ekonomi cenderung mendominasi cara berpikir tentang definisi pembangunan dan kesejahteraan. Secara konseptual, pembangunan dapat disebut sebagai pertumbuhan dan perluasan, perubahan, perbaikan, serta transformasi dan modernisasi (Seers, 1969, 2; Stiglitz, 1998, 3; Frank & Smith, 1999, 7; Stiglitz, 2002, 1963; Phillips & Pittman, 2009, 9; Bellu, 2011, 2). Oleh karena itu, seringkali dimaknai bahwa sebuah kota yang maju adalah kota dengan laju pertumbuhan ekonominya tinggi sebagaimana diwujudkan dalam bentuk gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan yang mewah, transportasi yang mewah, dan sebagainya. Kota-kota seperti itu merupakan surga bagi masyarakat konsumtif seperti yang banyak ditemui pada kota-kota besar di Indonesia.

Ternyata, pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses budaya karena ekonomi itu sendiri, merupakan bagian dari realitas budaya yang dapat membentuk *economic sense* sebagaimana disebutkan oleh Michael McPherson yang dikutip Chavoshbashi, Ghadami, Broumand&Marzban (2012, 7800). Dengan demikian, tak mengherankan bila pembangunan perkotaan di Indonesia dapat menyuburkan budaya konsumerisme bagi masyarakatnya ketika pembangunan ekonomi perkotaan lebih menitikberatkan pada realitas budaya tersebut. Budaya konsumerisme kemudian mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai produk yang melebihi kebutuhan dasar (Moxon, 2011, 2).

Budaya konsumerisme mungkin dinilai sebagai budaya "buruk" yang juga memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun, banyak sekali budaya "baik" yang memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi secara signifikan. Peranan budaya dalam perekonomian saat ini mendapat perhatian utama dari ahli ekonomi dan dipercaya bahwa budaya ekonomi suatu wilayah merupakan alat yang berguna bagi pembangunan (Guiso, Sapienza & Zingales, 2006, 45). Faktanya, banyak aset budaya seperti keterampilan dan produk mendorong kesejahteraan

masyarakat. Untuk memahami dampak budaya terhadap perekonomian, penting untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada diantara individu-individu dan aktifitas ekonominya (Chavoshbashi *et al.*, 2012, 7799).

Salah satu hasil penelitian yang memberikan gambaran dampak budaya terhadap ekonomi adalah penelitian yang dilakukan sendiri oleh Farzaneh Chavoshbashi, Mohsen Ghadami, Zahra Broumand, dan Fatemeh Marzban yang dimuat dalam *African Journal of Business Management* Volume 6(26) yang terbit tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik dan menarik untuk dikaji ulang, terutama mengkaji variabel-variabel yang digunakan dan kinerja model yang telah dibangun. Untuk mengkaji hasil penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dan analisis *system thinking* yang dibangun oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan. Kaji ulang ini dapat menjadi pembelajaran dalam memahami interaksi nilai-nilai budaya dalam pembangunan dan konstruksi rekayasa sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kajian ini juga mengulas kaitan budaya dan komunikasi dengan pembangunan ekonomi.

DISKUSI

Budaya dalam Perspektif Kemasyarakatan

Istilah budaya memiliki banyak arti dan telah dirumuskan dalam beberapa definisi. Dua orang ahli antropologi yang berpengaruh, [Alfred Louis Kroeber dan Clyde Kluckhohn dalam bukunya *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (1952)], telah mendokumentasikan lebih dari 161 definisi budaya (Cao, 2003, 371). Spencer-Oatey (2012, 2) mencoba mengkompilasi beberapa pengertian budaya sebagaimana terlihat pada Box-1.

Karena kompleksitas pengertian budaya dalam perspektif yang beragam, beberapa pengertian telah disederhanakan oleh beberapa orang peneliti/antropolog, sehingga lebih mudah dipahami oleh banyak orang dari beragam disiplin ilmu. Johnston *et al.* (2000) dalam Stephenson (2008, 129).

Box-1

Perhatikan beberapa definisi budaya berikut ini dan cermati karakter budaya yang mereka gambarkan sebagai berikut :

'Budaya...adalah kesatuan kompleks yang berisikan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kebiasaan dan kapabilitas lainnya yang dibuat oleh manusia sebagai anggota masyarakat'

(Tyler, Antropolog Inggris, 1870)

'Budaya terdiri atas pola-pola perilaku, baik eksplisit maupun implisit, yang dibuat dan disebarkan melalui simbol-simbol, berisikan pencapaian-pencapaian khas dari kelompok manusia, termasuk yang diwujudkan dalam bentuk artefak; esensi dari budaya terdiri atas ide-ide tradi-sional (yang diturunkan dan dipilih) dan khususnya nilai-nilainya; dalam satu sisi, sistem budaya juga dianggap sebagai hasil dari tindakan, dan pada sisi yang lain, dianggap sebagai unsur-unsur kondisional bagi tindakan masa depan'

(Kroeber & Kluckhohn 1952)

'Budaya terdiri atas turunan pengalaman, terorganisir atau tidak, yang dipelajari atau diciptakan oleh individu dalam suatu populasi, termasuk gambar-gambar atau kode-kode serta tafsir-tafsir (arti-arti) yang disampaikan dari generasi sebelumnya, mulai dari yang kontemporer atau yang dibentuk oleh individu itu sendiri'

(T.Schwartz 1992)

'Budaya adalah pemograman pikiran secara kolektif yang membedakan anggota suatu kelompok atau masyarakat dari yang lainnya'

(Hofstede 1994)

'...kumpulan sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat, tapi berbeda untuk tiap individu, dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya'

(Matsumoto 1996)

'Budaya adalah kumpulan asumsi dan nilai dasar yang samar-samar, berorientasi pada kehidupan, kepercayaan, kebijakan, prosedur, dan menjadi ketentuan perilaku yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat serta mempengaruhi (tapi tidak menentukan) perilaku tiap anggota dan interpretasi mereka terhadap perilaku kelompok lainnya'

(Spencer-Oatey 2008)

Sumber: diterjemahkan dari Spencer-Oatey (2012, 2)

Mendefinisikan budaya adalah suatu proses dinamik yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam konstruksi kehidupan kelompok dan hasilnya. Sedangkan Thrift dan Whatmore (2004) dalam Stephenson (2008, 129) melihat budaya dalam tiga arti menurut sudut pandang antropologi, yaitu: (1) sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat; (2) sebagai suatu cara fungsional yang menggambarkan identitas kelompok; dan (3) mengacu pada proses sosial tertentu.

Secara sederhana, budaya komunitas berarti kepercayaan, kesukaan, dan perilaku anggota komunitas, sepanjang sesuai dengan mekanisme yang menghubungkan ciri-ciri tersebut dengan yang lainnya. Budaya juga dimaknai untuk menyimpulkan cara suatu kelompok membedakan diri mereka dari kelompok yang lain melalui sejarah, tradisi, nilai, dan kepercayaan (Cao, 2003, 371). Masyarakat hidup berbudaya dan bukan dalam budaya, dengan sumber budaya yang diciptakan melalui praktek-praktek manusia itu sendiri ketimbang dari representasi dunia (Ingold 1994 dalam Stephenson, 2008, 129).

Nilai-Nilai Budaya dan Pembangunan Ekonomi

Schwartz (1999, 24-25) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi keinginan yang memandu cara pelaku sosial (seperti pemimpin organisasi, pembuat kebijakan, perorangan) memilih tindakan, menilai masyarakat dan kejadian, serta menjelaskan tindakan dan aksinya. Dalam pandangan tersebut, nilai merupakan kriteria atau tujuan lintas situasional (seperti keamanan dan hedonisme), diurut menurut kepentingan sebagai panduan kehidupan. Avrami *et al.* (2000) dalam Stephenson (2008, 129) menganggap konsep nilai sebagai suatu keadaan intrinsik dan universal yang saat ini secara umum menjadi suatu konstruksi sosial yang lahir dari konteks budaya dalam suatu waktu dan tempat.

Secara implisit atau eksplisit, nilai-nilai budaya merepresentasikan ide abstrak tentang apa itu barang, hak, dan keinginan dalam masyarakat (William 1970 dalam Schwartz, 1999, 25). Nilai-nilai budaya ini (seperti kebebasan, kesejahteraan, keamanan) merupakan dasar bagi norma-norma khusus yang menunjukkan apa yang cocok pada situasi yang beragam. Fungsi lembaga sosial (seperti sistem keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, agama), tujuan dan bentuk kegiatannya, mengekspresikan prioritas nilai-nilai budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang menilai pentingnya ambisi dan keberhasilan individu, organisasi ekonomi dan sistem hukumnya menjadi lebih kompetitif (seperti pasar kapitalis dan proses hukum *adversarial*).

Sebaliknya, sebuah budaya yang menekankan pada kesejahteraan kelompok diekspresikan dalam sistem hukum dan ekonomi yang lebih kooperatif (seperti sosialis dan mediasi) (Schwartz, 1999, 25).

Potensi perubahan budaya dapat dipahami dari perubahan konteks sosial ekonomi dunia sejak revolusi industri. Tibbs (2011, 16) menilai sumber perubahan mendasar adalah penambahan jumlah penduduk dalam 10 tahun mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 sehingga penduduk dunia bertambah dari 6 miliar menjadi 6.8 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat (tapi lebih lambat) sampai pertengahan abad 21. Pertumbuhan penduduk yang cepat merefleksikan keberhasilan modernisasi dan industrialisasi. Hal tersebut menyebabkan suatu perbaikan kondisi material yang tidak pernah terpikir sebelumnya dalam kehidupan ratusan juta penduduk, dengan meningkatnya pendapatan, harapan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Goklany 2007 dalam Tibbs, 2011, 16). Karakteristik utama modernisasi dalam 250 tahun sejak revolusi industri adalah ekspansi tanpa henti, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan industri dan perdagangan, dan ledakan penduduk dunia. Ekspansi merupakan salah satu prinsip dinamika modernisasi.

Guiso *et al.* (2006, 23-24) mencoba memberikan pemahaman yang sederhana dalam mendefinisikan nilai-nilai budaya dan pengaruhnya terhadap hasil-hasil ekonomi. Menurut mereka, langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendefinisikan budaya dalam bentuk yang lebih sempit sehingga mudah mengenali hubungan kausal budaya dan hasil-hasil ekonomi. Untuk alasan tersebut, mereka mendefinisikan budaya sebagai kepercayaan dan nilai-nilai adat yang diturun-temurunkan oleh suku, agama, dan kelompok sosial dari generasi ke generasi. Walaupun tidak mendalam, namun definisi ini fokus pada dimensi budaya yang dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi. Di samping itu, dengan membatasi potensi pengaruhnya pada dua hal yaitu kepercayaan dan nilai atau kesukaan, definisi tersebut memberikan suatu pendekatan yang dapat mengenali pengaruh kausal dari budaya terhadap hasil-hasil ekonomi.

Untuk mengenali nilai-nilai budaya dalam pembangunan ekonomi, Mariano Grondona, seorang intelektual berkebangsaan Argentina, memberikan sebuah indikator tipologi budaya dan dirinci oleh Harrison (2006, 36-37) (lihat Box-2) yang menjadi landasan teori yang dipertimbangkan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan dalam melakukan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam tulisannya yang berjudul *Designing Dynamic Modelling for Measuring the Effect of Cultural Values on Iran's Economic Growth*. Chavoshbashi et al. (2012, 7800) menggunakan dua jenis nilai dan standar yang mengemuka: nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang tidak memperhatikan manfaat dan bahayanya. Nilai patriotik kadangkala harus dikesampingkan karena dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebaliknya nilai instrumental lebih bernilai karena bermanfaat secara langsung. Oleh karena itu, Chavoshbashi dan kawan-kawan mengasumsikan bahwa sebuah negara mendedikasikan kebijakannya dalam pembangunan ekonomi dengan titik berat pada kesempatan kerja, produktivitas, dan investasi. Mereka mengelompokkan tipologi budaya Grondona dalam lima kategori yaitu: (1) nilai dan hasil yang berkaitan dengan kerja, (2) nilai-nilai universal, (3) nilai dan kepercayaan personal, (4) nilai-nilai tata kelola dan aturan, dan (5) nilai-nilai agama.

Berdasarkan hal tersebut, Chavoshbashi dan kawan-kawan mendefinisikan nilai-nilai budaya terdiri atas nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai individu mencakup nilai kerja, kreativitas dan inovasi, etika, penghematan, kebahagiaan personal, kedisiplinan, keuntungan, dan pembelajaran. Nilai-nilai sosial meliputi rasa saling percaya, keadilan dan kesetaraan, tanggung jawab sosial, kerjasama, keterampilan interaktif, akuntabilitas, kesejajaran, taat hukum, dan hal lainnya. Mereka membuat pembobotan masing-masing nilai dengan teknik AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan menghitung nilai awal dengan menggunakan software VENSIM. Berdasarkan metode tersebut, mereka mendapatkan nilai tertinggi untuk nilai individu (nilai etika dan kebahagiaan personal) dan nilai sosial (keterampilan interaktif dan akuntabilitas).

Interaksi dan Interseksi Kajian Budaya, Komunikasi, dan Ekonomi

Pembangunan sebagai sebuah proses budaya, diyakini melibatkan seperangkat nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu individu, komunitas, bangsa, dan negara. Marañña (2010, 3-4) menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, telah diterima secara luas untuk memasukkan dimensi budaya dalam tindakan dan kebijakan pembangunan. Karena prioritas pembangunan manusia berkelanjutan dalam model pembangunan ekonometrik lainnya, budaya telah dipelajari sebagai suatu elemen penting bagi pembangunan manusia dan komunitas.

Ekonom klasik menggunakan penjelasan budaya untuk menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi. Adam Smith memandang argumennya dalam tulisan berjudul *A Theory of Moral Sentiments* sebagai satu kesatuan dengan argumennya dalam tulisan berjudul *The Wealth of Nations*. Sedangkan John Stuart Mill menganggap kendala budaya seringkali lebih penting daripada nilai-nilai dari kepentingan personal (Guiso *et al.*, 2006, 26).

Contoh-contoh konkrit diberikan oleh Giuliano (2004) dalam Guiso *et al.* (2006, 37) yang menunjukkan bahwa kehidupan keluarga di Amerika Serikat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tapi juga oleh warisan budaya (seperti struktur keluarga di negeri asalnya). Begitu pula dengan Ferná'ndez *et al.* (2004) dan Ferná'ndez dan Fogli (2005) dalam Guiso *et al.* (2006, 37) yang menunjukkan bahwa pilihan kerja dan fertilitas pada wanita Amerika generasi kedua dipengaruhi oleh partisipasi angkatan kerja wanita dan laju fertilitas para leluhur-leluhurnya. Terakhir, Ichino dan Maggi (2000) dalam Guiso *et al.* (2006, 37) mendokumentasikan bahwa kebiasaan masyarakat Italia yang melalaikan pekerjaan didorong oleh daerah asal kelahirannya, yang dapat diinterpretasikan sebagai perwakilan latar belakang budaya.

Perspektif agama juga memainkan peran vital dalam memaknai hubungan antara budaya dan ekonomi karena agama sangat dekat kaitannya dengan budaya. Leiknes (2009) dalam Chavoshbashi *et al.* (2012, 7800) menyatakan

bahwa agama menyediakan serangkaian nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pengikut-pengikutnya. Barro dan McClear (2003) dalam Chavoshbashi *et al.*(2012, 7801) menjelaskan alasan yang kuat kepercayaan agama dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena perilaku tertentu dapat meningkatkan produktifitas.

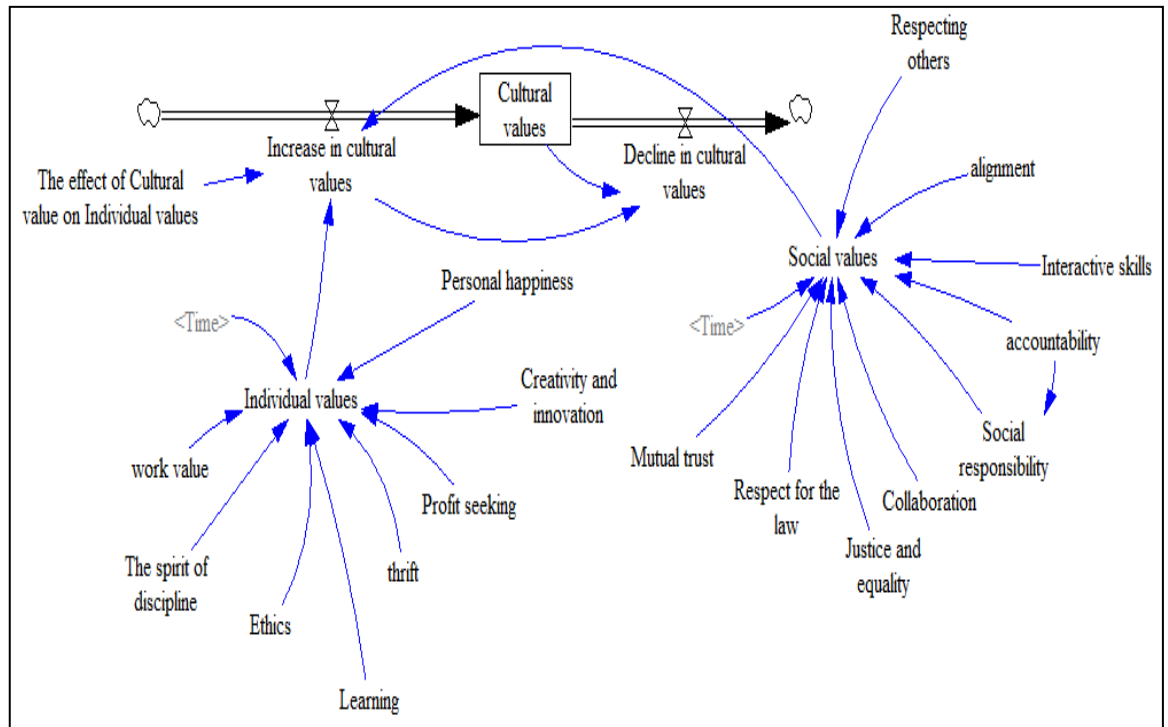
Ajaran agama membentuk nilai-nilai individu dan sosial secara komplementer. Delapan variabel pembentuk nilai individu dan sembilan variabel pembentuk nilai sosial yang digunakan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan dalam tulisannya ini dimungkinkan berasal dari ajaran agama yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sangat mungkin nilai taat hukum dibangkitkan dari semangat disiplin tiap individu manusia yang beragama dengan ajaran-ajaran penghargaan terhadap waktu, makhluk hidup, dan sebagainya. Dengan demikian, sifat kompleksitas agama dapat menyebabkan penyederhanaan interaksi antara budaya dan ekonomi memberikan ukuran yang bias dan kurang berguna.

Konstruksi Pengaruh Budaya terhadap Ekonomi

Chavoshbashi dan kawan-kawan dalam tulisannya membangun struktur model nilai-nilai budaya sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ada tujuh belas unsur pembentuk nilai-nilai budaya yang disusun secara bebas dalam struktur, dan hanya unsur tanggung jawab sosial yang tak bebas (dipengaruhi oleh akuntabilitas). Nilai budaya dengan skor 100 yang ditentukan oleh nilai sosial sebesar 87.5 % dan nilai individu sebesar 12.5 %.

Proporsi skor unsur pembentuk nilai individu dan nilai sosial didapatkan berdasarkan tingkat penerimaan dan persetujuan responden yang berasal dari ahli-ahli terkait. Proporsi skor dimungkinkan akan berbeda bila responden ahli diganti secara masif dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, bahkan akan lebih nyata bila keragaman latar belakang budaya yang dimilikinya menjadi pertimbangan. Namun, proporsi logis terhadap nilai individu dan nilai sosial sebagaimana yang diungkapkan Chavoshbashi dan kawan-

kawan dapat menjadi landasan struktural yang kuat dalam membangun model dinamik.



Gambar 1. Pola Simulasi Nilai Budaya

Memperhatikan nilai sosial dan nilai individu yang dikaji, Chavoshbashi dan kawan-kawan tidak mengindikasikan adanya hubungan antara nilai sosial dan nilai individu. Bukankah nilai-nilai sosial juga dapat dibangkitkan dari nilai-nilai individu atau sebaliknya? Kita dapat mengamatinya pada dinamika masyarakat hukum adat. Mereka mengandalkan nilai-nilai sosial sebagai bentuk kolektivitas dalam pembangunan di wilayahnya. Sebagai contoh pada masyarakat Minangkabau (Asmin, Darusman, Ichwandi, & Suharjito, 2017b, 140-149), budaya arisan sebagai bentuk kolektivitas masyarakat untuk menyuburkan nilai-nilai sosial dalam penguatan ekonomi keluarga.

Masyarakat Minangkabau dengan kekuatan pengetahuan lokalnya juga mentransmisikan nilai-nilai sosial menjadi nilai-nilai individu melalui pesan-pesan moral dan spiritual (Asmin, Darusman, Ichwandi, & Suharjito, 2016, 208-220; Asmin, Darusman, Ichwandi, & Suharjito, 2017a, 2812-2817). Hubungan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai individu dapat berkaitan dengan peran komunikasi. Kusumastuti & Priliantini (2017, 182) dalam penelitiannya tentang pengaruh

komunikasi terhadap pembangunan pariwisata di Kawasan Dieng membuktikan bahwa komunikasi mampu mengangkat budaya daerah dan kearifan lokal untuk mendukung pariwisata daerah.

Budaya merupakan salah satu tingkatan yang menunjukkan keunikan manusia selaku komunitas seperti dijelaskan oleh Hofstede (1991, 6), selain dari sifat manusia dan kepribadian. Gambar 2 menjelaskan tiga level keunikan manusia. Budaya lahir dari sebuah proses pembelajaran dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya dilandaskan oleh sifat manusia dan berperan dalam membentuk kepribadian.



Gambar 2: tiga Level Keunikan Manusia (Hofstede, 1991, 6)

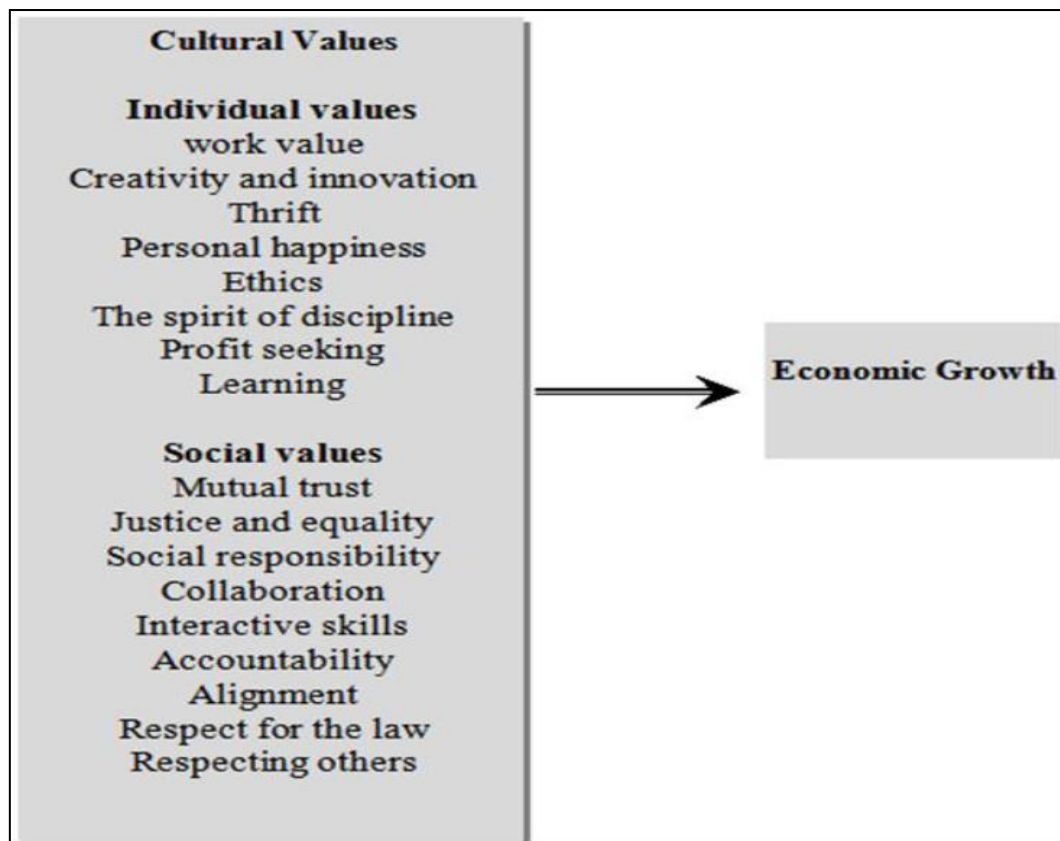
Hofstede (1991, 9-17) menjelaskan bahwa manifestasi dari budaya diwujudkan dalam berbagai nilai, ritual, kisah, dan simbol yang dipraktikkan oleh komunitas masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan budaya menurut wilayah, agama, gender, generasi, dan kelas. Pemahaman terhadap budaya penting dalam mengikuti perubahan sosial, baik dalam bentuk perubahan tiba-tiba, transformatif, maupun terencana seperti yang diungkapkan Reeler (2007, 9-14).

Karena budaya dipandang sebagai sesuatu yang dibagikan oleh masyarakat (Levine, Park, & Kim, 2007, 219), maka komunikasi memiliki peran transformasi yang bisa terjadi antar budaya dan/atau lintas budaya. Liliweri (2003) menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, dan gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan

kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dan dapat juga dilakukan dengan bahasa non verbal menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu.

Sementara itu, sifat unsur-unsur yang dominan saling bebas terbangun dari asumsi yang digunakan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan, yaitu hampir tidak ada konflik. Asumsi dasar ini merupakan bentuk penyederhanaan dari kompleksitas nilai-nilai budaya. Bila kita perhatikan dari fenomena konflik yang banyak terjadi pada beberapa negara, sangat logis asumsi ini digunakan karena hampir semua negara yang berkonflik menunjukkan kinerja perekonomian yang buruk. Tapi dalam skala mikro, konflik individu juga dapat dimaknai dalam persaingan antar individu dalam mencapai strata sosial yang lebih baik, sebagaimana banyak terjadi pada komunitas-komunitas masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia.

Bangunan pengaruh budaya terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat kompleksitas yang cenderung semakin tinggi karena pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses perkembangan budaya. Dengan demikian, bangunan model konseptual nilai budaya dan pertumbuhan ekonomi tidak sesederhana sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Nilai-nilai budaya dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang berbeda pada masing-masing komponen yang menyusun pertumbuhan ekonomi. Ketika Chavoshbashi dan kawan-kawan mengasumsikan dedikasi pemerintah terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, produktivitas, dan investasi dalam mengembangkan perekonomiannya, maka pengaruh etos kerja pada masing-masing individu tenaga kerja, memberikan pengaruh signifikan pada komponen produktivitas. Dengan demikian, ilustrasi pertumbuhan ekonomi dapat berada dalam lingkaran besar nilai-nilai budaya.



Gambar 3: Model Konseptual Nilai Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi

Karena tujuan tulisan ini untuk mempelajari bagaimana kecenderungan pertumbuhan ekonomi akibat pengaruh nilai-nilai budaya, Chavoshbashi dan kawan-kawan mencoba mencari linearitas hubungan antara budaya dan ekonomi. Mereka menjelaskan linearitas tersebut dengan baik pada struktur model yang mereka bangun, sehingga model ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana pengaruh budaya terhadap ekonomi dalam sistem yang sesungguhnya karena gejala – gejala linearitas dalam konteks budaya sangat mungkin seringkali terjadi.

Perilaku Dinamik

Pada bagian ini, penulis menguraikan lebih detail terhadap model yang dibangun Chavoshbashi dan kawan-kawan. Dalam tulisannya ini, Chavoshbashi dan kawan-kawan menyatakan bahwa skor 100 terhadap semua kriteria yang menyusun nilai budaya disumbangkan 12.5 % oleh nilai-nilai individu dan 87.5 % oleh nilai-nilai sosial. Bobot terbesar dari indikator-indikator yang berhubungan dengan nilai-nilai individu adalah etika dan kebahagiaan personal, sedangkan

bobot terbesar dari indikator-indikator yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial adalah keterampilan interaktif dan akuntabilitas. Namun, Chavoshbashi dan kawan-kawan tidak menjelaskan kenapa indikator-indikator tersebut diberikan bobot yang lebih besar dari yang lain.

Mihailović, Cvijanović, & Simonović (2015, 85) memang mengindikasikan bahwa persoalan-persoalan etika menjadi sangat penting bagi pengembangan usaha, terutama untuk skala industri. Sementara itu, Uchida & Ogihara (2012, 354) menyatakan bahwa kebahagiaan personal berkaitan dengan kesejahteraan, yang dipengaruhi oleh harmonisasi hubungan dan dukungan sosial dari yang lain. Pada dasarnya, etika dan kebahagiaan personal juga berkaitan dengan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Hal ini belum mendapatkan perhatian dalam model yang disusun oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan. Karena kegiatan ekonomi melibatkan banyak orang, maka penting untuk memperhatikan komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Levine *et al.*, (2007, 208) membedakan komunikasi antar budaya sebagai pola interaksi antara orang-orang dari berbagai budaya dan komunikasi lintas budaya sebagai pola komunikasi antara satu budaya dengan budaya lain dari kelompok orang yang berbeda.

Sama halnya dengan keterampilan interaktif dan akuntabilitas, Chavoshbashi dan kawan-kawan dengan jelas mempertimbangkan pengembangan ekonomi oleh sektor industri. Keterampilan berkaitan dengan produktivitas dan akuntabilitas berkaitan dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Hal-hal tersebut memang penting dalam berbagai aktivitas bisnis saat ini. Brainbench (2003, 1-4) menjelaskan bahwa keterampilan dan akuntabilitas juga dapat dibangun melalui komunikasi.

Jika kita memperhatikan kembali tulisan Chavoshbashi dan kawan-kawan, sumbangan komponen nilai-nilai individu adalah nilai kerja sebesar 23 %, kreativitas dan inovasi sebesar 9 %, penghematan sebesar 2 %, kebahagiaan personal sebesar 13 %, kedisiplinan sebesar 3.9 %, etika sebesar 21.5 %, keuntungan sebesar 4.1 %, dan pembelajaran sebesar 23 %. Untuk nilai-nilai sosial,

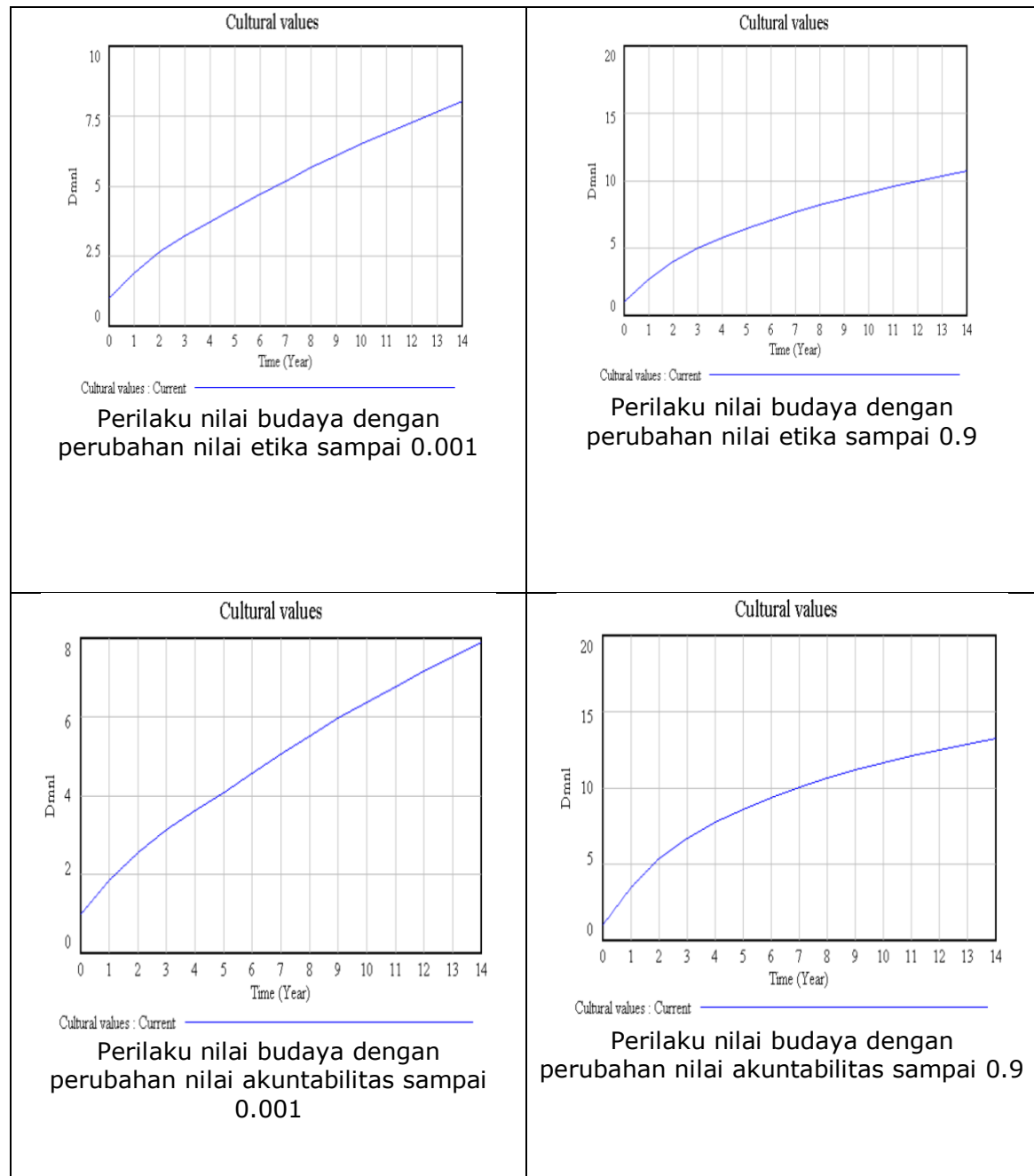
sumbangan masing-masing komponennya adalah rasa saling percaya sebesar 6.4 %, keadilan dan kesetaraan sebesar 12.5 %, tanggung jawab sosial sebesar 12.3 %, kerjasama sebesar 1 %, keterampilan interaktif sebesar 15.7 %, akuntabilitas sebesar 13 %, kesejajaran sebesar 7.8 %, ketaatan hukum sebesar 9.6 %, dan yang lainnya sebesar 12.7 %.

Untuk memahami perilaku model, mereka juga melakukan uji sensitivitas dengan mengubah nilai individu dan nilai sosial melalui variabel etika untuk nilai individu dan akuntabilitas untuk nilai sosial. Pemilihan variabel tersebut dengan alasan bahwa masing-masingnya memberikan sumbangan yang besar pada masing-masing nilai yang dipengaruhi. Melihat persentase sumbangan masing-masing nilai, nilai kerja untuk nilai individu dan keterampilan interaktif untuk nilai sosial memberikan sumbangan terbesar. Chavoshbashi dan kawan-kawan tidak memberikan penjelasan yang memadai untuk hal tersebut.

Namun, bila kita perbandingan, memang akumulasi nilai etika dan kebahagiaan personal memberikan sumbangan terbesar untuk nilai individu, sehingga mengalahkan proporsi nilai kerja. Dengan demikian, cukup dipahami, Chavoshbashi dan kawan-kawan memilih nilai etika karena memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kebahagiaan personal. Ketika kita perbandingan akumulasi nilai keterampilan interaktif dan akuntabilitas, memang nilai keduanya memberikan sumbangan terbesar dalam menyusun nilai sosial. Tapi tidak cukup dipahami kenapa Chavoshbashi dan kawan-kawan lebih memilih akuntabilitas sebagai indikator nilai dalam uji sensitivitasnya. Ada inkonsistensi pemilihan yang dilakukan oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan. Sepertinya, nilai etika dan nilai akuntabilitas, menurut mereka, lebih mudah dimaknai dan diimplementasikan dalam sistem sesungguhnya. Saat ini, etika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam pengembangan ekonomi sehingga banyak sekali muncul standar-standar kode etik untuk tiap kegiatan dalam bidang ekonomi. Begitu pula dengan akuntabilitas, telah menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam setiap paket program

dan kegiatan yang diluncurkan pemerintah serta pada proyek-proyek usaha berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil uji sensitivitas yang dilakukan Chavoshbashi dan kawan-kawan, terlihat bahwa perubahan parameter pada etika dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang berbeda dalam menyusun nilai budaya sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4: Hasil Uji Sensitivitas

Berdasarkan hasil uji sensitivitas tersebut, terlihat kecenderungan perilaku yang sama antara etika dan

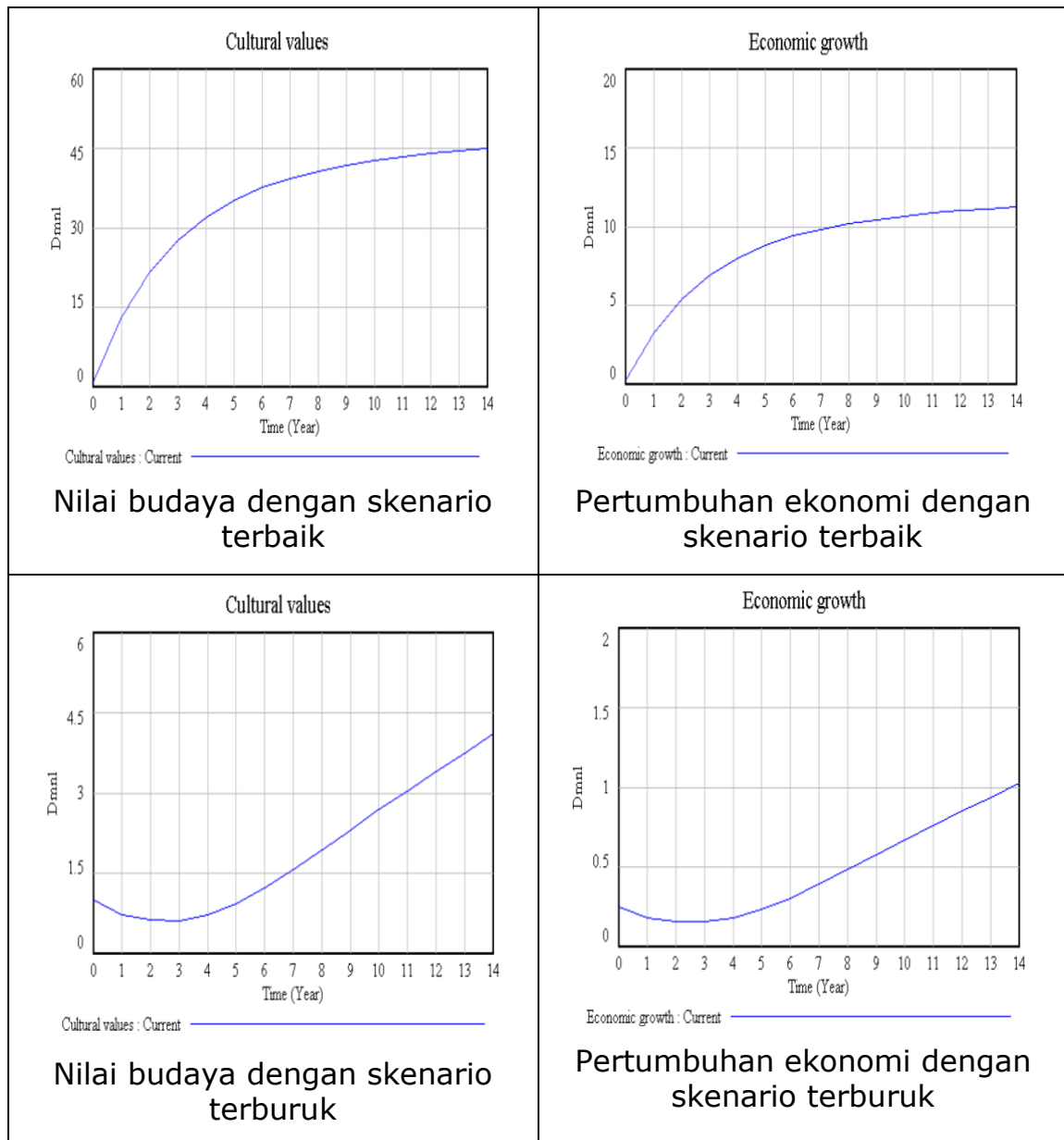
akuntabilitas dalam mempengaruhi nilai budaya. Perilaku ini menggambarkan gejala linearitas dalam kompilasi hubungan antara nilai individu dan nilai sosial yang membentuk nilai budaya. Bisa dipastikan, dengan bangunan model sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3, pengaruh budaya terhadap pertumbuhan ekonomi akan memberikan perilaku yang sama dengan perilaku yang digambarkan pada Gambar 4.

Kekekaran Model

Untuk melihat bagaimana kinerja nilai budaya mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, Chavoshbashi dan kawan-kawan mencoba mengembangkan skenario terbaik dan terburuk dengan mempertimbangkan parameter kritis dalam skenario dasar (*baseline scenario*) dan hasil analisis uji sensitivitas. Skenario terbaik dengan mengembangkan parameter nilai budaya sampai 0.9 dan skenario terburuk dengan menentukan parameter nilai budaya akan berubah sampai 0.001, sehingga perilaku nilai budaya dan pertumbuhan ekonomi dalam kedua skenario dapat dibandingkan (seperti terlihat pada Gambar 5).

Berdasarkan Gambar 5 tersebut, peningkatan nilai budaya sampai 0.9 akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata sampai 293.4 %, yang lebih tinggi dari skenario dasar yang hanya 50.9 %. Sedangkan penurunan nilai budaya sampai 0.001, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 20.8 %, atau lebih rendah dari skenario dasar.

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa model yang dibangun oleh Chavoshbashi dan kawan-kawan cukup kekar (*robust*) terhadap berbagai perubahan parameter secara fungsional (*functional intervention*). Namun, dalam tulisannya ini, Chavoshbashi dan kawan-kawan tidak melakukan intervensi struktural (*structural intervention*) untuk melihat lebih jauh bagaimana kinerja model. Intervensi struktural dimungkinkan apabila asumsi konflik yang digunakan direkayasa sedemikian rupa sehingga tersedia pembahasan kinerja model secara struktural.



Gambar 5:Perilaku Model dengan Skenario Terbaik dan Terburuk

Fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk pada pertengahan tahun pertama dipahami sebagai sebuah stres akibat gangguan sistem untuk mencari kesetimbangan baru dalam kecenderungan perilaku yang sama dengan perilaku model. Artinya, nilai budaya yang rendah menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berlangsung secara perlahan, dan bila suatu komunitas ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya, maka orientasi nilai-nilai budaya mereka harus diubah sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi yang mereka cita – citakan.

Peran Komunikasi bagi Budaya dan Ekonomi

Chavoshbashi dan kawan-kawan tidak mengelaborasi lebih detail bagaimana nilai-nilai budaya tersebut dapat ditumbuhkembangkan. Namun, tulisan Chavoshbashi dan kawan-kawan tersebut dapat dikembangkan lebih luas dengan perspektif komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan kepedulian terhadap kebutuhan dan masalah serta aliran informasi dalam pengambilan keputusan, manajemen, mobilisasi, dan penyelesaian konflik, atau disebut juga dengan koordinasi (Uphoff, 1986, 31). Dalam konteks sistem sosial, komunikasi dapat diidentikkan dengan proses-proses integrasi dalam pengelolaan sumber daya (Parsons, 1991, 116; Uphoff, 2000, 245).

Nilai-nilai sosial dan nilai-nilai individu dapat melandasi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat dan ditransmisikan melalui komunikasi. Perspektif komunikasi menjadi penting ketika relasi sosial dalam bentuk jejaring (*networks*) untuk mendukung pembangunan ekonomi semakin diperlukan. Dalam masyarakat yang plural, kemampuan komunikasi menentukan capaian pembangunan pada suatu wilayah. Bahkan dalam era teknologi saat ini, peran komunikasi semakin nyata dengan semakin berkembangnya media-media komunikasi yang lebih beragam.

Tantangan dalam kajian budaya dan ekonomi saat ini juga berkaitan dengan semakin pentingnya peran komunikasi dalam pembangunan. Sebagai contoh dalam pembangunan pertanian, karena pentingnya peran komunikasi dalam pemberdayaan kelembagaan petani, berbagai pihak kemudian mempertimbangkan agen-agen komunikasi (yang juga dapat berperan sebagai agen perubahan) dalam setiap upaya yang menyentuh kepentingan kelembagaan di tingkat lokal terkait dengan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pada setiap sektor ekonomi, komunikasi dapat nilai-nilai sosial dan nilai-nilai individu yang produktif bagi pembangunan ekonomi itu sendiri.

KESIMPULAN

Tulisan Chavoshbashi dan kawan-kawan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana perilaku

pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu komunitas, bangsa, dan negara. Beberapa hasil penelitian tentang nilai-nilai budaya dapat digunakan sebagai landasan kuantifikasi nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial, dan Chavoshbashi dan kawan-kawan mengimplementasikannya dengan baik untuk mengatasi kompleksitas budaya itu sendiri dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Secara fungsional, Chavoshbashi dan kawan-kawan meyakinkan kepada kita semua bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari budaya karena pembangunan ekonomi itu sendiri adalah proses budaya. Oleh sebab itu, secara struktural, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa penghancuran nilai-nilai budaya adalah bentuk terorisme terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Namun, peran komunikasi dapat dipertimbangkan untuk menjaga nilai-nilai budaya tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan atas segala dukungannya.

REFERENSI

- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2016). Local ecological knowledge on forest clearing: A case study of parak and rimbo practices in Simancuang Community, Indonesia. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 8(2), 208–220. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v8i2.5856>
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2017a). Elaborating the attributes of local ecological knowledge: A case study of parak and rimbo practices in Koto Malintang Village. *Advanced Science Letters*, 23(4), 2812–2817. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7682>
- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., & Suharjito, D. (2017b). Social capital of parak and rimbo management in West Sumatra. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 23(3),

140–149.

Bellù, L. G. (2011). *Development and development paradigms: A (reasoned) review of prevailing visions. EASYPol Module*. Rome: FAO.

Brainbench. (2003). *3 ways to establish employee skills ownership and accountability. Thought Leadership Report*.

Cao, L. (2003). Culture change. *VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 47(2), 357–412. Retrieved from <http://www.motherjones.com/politics/2003/01/culture-change>

Chavoshbashi, F., Ghadami, M., Broumand, Z., & Marzban, F. (2012). Designing dynamic model for measuring the effects of cultural values on Iran's economic growth. *African Journal of Business Management*, 6(26), 7799–7815. <https://doi.org/10.5897/AJBM11.2473>

Frank, F., & Smith, A. (1999). *The Community Development Handbook: A Tool to Build Community Capacity. Human Resource Development Canada*. Quebec: Minister of Public Works and Government Services Canada. <https://doi.org/MP 33-13/1999E>

Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2006). Does culture affect economic outcomes? *Journal of Economic Perspectives*, 20(2), 23–48.

Harrison, L. E. (2006). *The Central Liberal Truth: How Politics Can Change a Culture and Save it From Itself*. Oxford: Oxford University Press, Inc. Retrieved from <http://books.google.com/books?id=zqVtTttvousC&pgis=1>

Hofstede, G. (1991). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. Berkshire: Mc-Graw-Hill Book Company. Retrieved from <http://www.amazon.com/Cultures-Organizations-Software-Third-Edition/dp/0071664181>

Kusumastuti, R. D., & Priliantini, A. (2017). Dieng Culture Festival: Media komunikasi budaya mendongkrak pariwisata daerah. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 163–185. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.182>

Levine, T. R., Park, H. S., & Kim, R. K. (2007). Some

- conceptual and theoretical challenges for cross-cultural communication research in the 21st century. *Journal of Intercultural Communication Research*, 36(3), 205–221. <https://doi.org/10.1080/17475750701737140>
- Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maraña, M. (2010). *Culture and Development: Evolution and Prospects* (No. 1). *UNESCO Etxea* (Vol. 1). Bilbao. Retrieved from www.unescoetxae.org
- Mihailović, B., Cvijanović, D., & Simonović, Z. (2015). Role of business ethics in management of human resources. *EKOONOMIKA*, 61(1), 85–96.
- Moxon, D. (2011). Consumer culture and the 2011 “Riots.” *Sociological Research Online*, 16(4), 1–5.
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. *American Sociological Review* (Vol. 18). <https://doi.org/10.2307/2087860>
- Phillips, R., & Pittman, R. H. (2009). *A framework for community and economic development*. (R. Phillips & R. H. Pittman, Eds.), *An Introduction to Community Development*. New York: Routledge.
- Reeler, D. (2007). *A Three-fold Theory of Social Change and Implications for Practice, Planning, Monitoring and Evaluation*. Community Development Resource Association.
- Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implication for work. *Applied Psychology: An International Review*, 48(1), 23–47.
- Seers, D. (1969). *The meaning of development*. *IDS Communication* (Vol. 44). <https://doi.org/10.1002/pad.592>
- Spencer-Oatey, H. (2012). What is culture? A compilation of quotations. *Global PAD Core Concepts*, 1–22.
- Stephenson, J. (2008). The cultural values model: An integrated approach to values in landscapes. *Landscape and Urban Planning*, 84(2), 127–139. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.003>

- Stiglitz, J. E. (1998). *Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes. Prebisch Lecture*. Geneva.
- Stiglitz, J. E. (2002). Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm. *Review of Development Economics*, 6(2), 163–182. <https://doi.org/10.1111/1467-9361.00148>
- Tibbs, H. (2011). Changing cultural values and the transition to sustainability. *Journal of Futures Studies*, 15(3), 13–32.
- Uchida, Y., & Ogihara, Y. (2012). Personal or interpersonal construal of happiness: A cultural psychological perspective. *International Journal of Wellbeing*, 2(4), 354–369. <https://doi.org/10.5502/ijw.v2.i4.5>
- Uphoff, N. (1986). Decentralization and Good Governance : a Framework of Decentralization for Sustainable Community Development, 48–62.
- Uphoff, N. (2000). Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation. In P. Dasgupta & I. Serageldin (Eds.), *Social capital: A multifaceted perspective* (Vol. World Bank, pp. 215–249). Washington DC: World Bank.